

**PENGARUH SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH,
KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PENERAPAN STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN**

PEMERINTAH DAERAH

(Studi Pada Kantor Pemerintah Daerah Kab. Bima)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Oleh:

Julaiha

NPM. 22101082126



PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

MALANG

2025

**PENGARUH SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DEERAH,
KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PENERAPAN STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH**

(Studi pada Kantor Pemerintah Daerah Kab. Bima)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Oleh:

Julaiha

NPM. 22101082126



PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

MALANG

2025

ABSTRAK

This study aims to determine the effect of regional management information systems, human resource quality, application of government accounting standards, and internal control systems on the quality of regional government financial reports. The population in this study were employees working in the regional apparatus organization of Bima Regency. The sampling technique used the purpose sampling method, the number of samples used in this study was 71 respondents. The data used in this study were primary data, obtained directly from respondents through the distribution of questionnaires. The data obtained were analyzed using multiple linear regression methods. The results of the study showed that the regional management information system and internal control system had a significant positive effect on the quality of reports, while the quality of human resources and the application of government accounting standards did not have a significant effect. Thus, the effectiveness of the use of SIMDA and strengthening the internal control system are key factors in improving the quality of regional financial reports. On the other hand, efforts to improve the quality of human resources and SAP still require further development in order to make a real contribution to the quality of financial reports.

Keywords: *SIMDA, resource quality, Application of accounting standar, internal control system*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem informasi manajemen daerah, kualitas sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang bekerja pada organisasi perangkat daerah di Kabupaten Bima. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling, dengan jumlah sampel sebanyak 71 responden. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang diperoleh secara langsung dari responden melalui penyebaran kuesioner. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan, sedangkan kualitas sumber daya manusia dan penerapan standar akuntansi pemerintahan tidak berpengaruh signifikan. Dengan demikian, efektivitas penggunaan SIMDA dan penguatan sistem pengendalian internal merupakan faktor kunci dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah. Sementara itu, upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan penerapan SAP masih memerlukan pengembangan lebih lanjut agar dapat memberikan kontribusi nyata terhadap kualitas laporan keuangan.

Kata kunci: SIMDA, kualitas sumber daya, penerapan standar akuntansi, sistem pengendalian internal.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Daerah memiliki tanggungjawab untuk merancang dan mengelola laporan keuangan sebagai sarana pengendalian serta bentuk pertanggung jawaban atas berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan. Salah satu cara pemerintah menunjukkan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah melalui akuntabilitas dan transparansi dalam pengelola keuangan daerah yang diwujudkan melalui laporan keuangan. Dari sisi sumber daya finansial, Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyusun laporan keuangan sebagaimana diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010. Menurut (Lynda et al. 2019) Pemerintah diwajibkan untuk memberikan informasi keuangan yang relevan bagi para pemangku kepentingan. Dengan demikian, Laporan keuangan daerah diharapkan dapat memberikan gambaran kondisi keuangan Pemerintah secara akurat, andal, dan mudah di pahami oleh masyarakat.

Kualitas Laporan keuangan yang baik tidak hanya mencerminkan kinerja instansi Pemerintah, tetapi juga berfungsi sebagai alat kontrol yang efektif bagi masyarakat dan pemangku kepentingan. Laporan keuangan yang baik harus akurat, relevan, andal, dan mudah dipahami. Menurut Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kualitas laporan keuangan daerah diukur melalui opini audit yang diberikan berdasarkan kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern. Ketika BPK

memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan pemerintah daerah, hal ini menunjukkan bahwa laporan keuangan entitas disajikan secara wajar dalam semua hal yang material.

Selain opini wajar tanpa pengecualian (WTP), terdapat pula opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), yang menunjukkan adanya beberapa pengecualian meskipun laporan keuangan secara keseluruhan sudah sesuai. Opini Tidak Wajar (TW) menunjukkan adanya ketidaksesuaian substansial dalam laporan keuangan, sedangkan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) diberikan jika auditor tidak dapat memberikan penilaian secara meyakinkan (Yuliani & Agustini, 2016).

Berbagai faktor yang berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, seperti penerapan sistem informasi yang tepat, kualitas sumber daya manusia (SDM), kepatuhan pada standar akuntansi pemerintahan (SAP), serta efektivitas sistem pengendalian internal (SPI) yang tepat dan efisien yang sangat berperan dalam memastikan transparansi dan akurasi data (Mardiasmo, 2009). Untuk mencapai kualitas laporan keuangan daerah yang baik, Pemerintah daerah memanfaatkan teknologi informasi melalui penerapan Aplikasi sistem informasi manajemen daerah. Sistem informasi manajemen daerah yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah salah satu bentuk teknologi informasi yang digunakan oleh pemerintah daerah untuk mengelola keuangan daerah agar menghasilkan laporan keuangan yang lebih lengkap dan terintegrasi (Runtuwene et al., 2017). Sistem informasi manajemen daerah menjadi

komponen utama dalam pengelolaan data serta informasi keuangan. Sistem ini memungkinkan Pemerintah daerah untuk mengintegrasikan berbagai aspek keuangan sehingga menghasilkan informasi yang lebih akurat dan tepat waktu.

Selain itu, kualitas sumber daya manusia juga menjadi faktor kunci dalam pengelolaan keuangan, Menurut Winsyah (2012) Untuk menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas, maka dalam pembuatan laporan keuangan juga dibutuhkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas yang memiliki kompetensi dan keahlian dalam bidang akuntansi dan keuangan akan mampu menghasilkan laporan keuangan yang lebih baik sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Sumber daya manusia diharapkan dapat mengoperasikan Sistem informasi manajemen daerah dengan optimal, yang tidak hanya memahami aspek teknis, tetapi juga memiliki integritas tinggi, berperan penting dalam mendorong peningkatan akuntabilitas dalam proses penyusunan laporan keuangan (Hastuti, 2013). Oleh karena itu, pengembangan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia menjadi kebutuhan yang sangat penting, terutama dalam peningkatan kemampuan numerasi dan penggunaan sistem informasi untuk mendukung tercapainya kualitas laporan keuangan.

Hal mendasar dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan juga dengan Penerapan standar akuntansi Pemerintahan. Standar akuntansi Pemerintahan adalah sistem yang digunakan oleh Pemerintah untuk mengawasi dan melaporkan masalah keuangan, dengan tujuan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Penerapan standar akuntansi Pemerintahan yang konsisten akan memastikan bahwa laporan yang dihasilkan sesuai dengan prinsip-prinsip

akuntansi yang diterima secara umum, sehingga meningkatkan keandalan dan kredibilitas laporan tersebut (PP No. 71/2010). Dengan kepatuhan terhadap standar akuntansi pemerintahan, pemerintah daerah dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan (Sari, 2013).

Menurut Mahmudi (2016) Peran Sistem Pengendalian Internal sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan. Sistem pengendalian internal merupakan suatu proses yang menyeluruh dan dilakukan secara berkesinambungan oleh para pemimpin serta seluruh staf untuk memberikan kepastian yang cukup mengenai tercapainya tujuan organisasi melalui aktivitas yang efisien dan efektif (Dermawan, 2018). Sistem pengendalian internal berfungsi untuk mendeteksi dan menangani risiko kesalahan yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan, serta memastikan agar proses pelaporan keuangan dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab (Halim, 2015). Oleh karena itu, Sistem pengendalian internal penting untuk dievaluasi guna mengetahui sejauh mana perannya dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah.

Kabupaten Bima sebagai daerah yang sedang berkembang, terus berupaya meningkatkan kualitas laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Upaya tersebut tercermin dari opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang berhasil dipertahankan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2022. Namun demikian, dalam laporan yang

disampaikan oleh BPK Perwakilan NTB pada Mei 2023, masih ditemukan sejumlah catatan penting yang menunjukkan perlunya peningkatan dalam aspek teknis dan pengendalian pelaporan keuangan. Salah satu temuan yang disorot adalah masih adanya kelemahan dalam sistem pengendalian internal. Di samping itu, pada tahun 2023 juga ditemukan adanya overestimasi pendapatan daerah, yang berpengaruh terhadap akurasi dan keandalan laporan yang dihasilkan.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sudah terdapat sistem dan regulasi yang mendukung, seperti penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), masih diperlukan optimalisasi dalam implementasinya. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) juga menjadi salah satu aspek krusial untuk menjamin akurasi dan keandalan laporan keuangan. Sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah perlu terus diberikan pelatihan dan penguatan pemahaman terhadap Standar akuntansi pemerintah (SAP), sistem pelaporan berbasis SIMDA, serta penguatan atas pengendalian internal.

Dengan demikian, kualitas laporan keuangan tidak hanya memenuhi aspek kepatuhan, tetapi juga mencerminkan kondisi keuangan daerah secara objektif dan transparan. Berdasarkan kondisi tersebut, penting untuk meneliti sejauh mana kontribusi dari Sistem informasi Manajemen daerah (SIMDA), kualitas Sumber daya manusia (SDM), penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP), serta efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SPI) terhadap kualitas laporan keuangan di Kabupaten Bima.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti sangat tertarik untuk meneliti terkait **“PENGARUH SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DAERAH, KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA, PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN, DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH DI KABUPATEN BIMA”**. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi strategis bagi peningkatan kualitas keuangan daerah yang lebih baik di masa mendatang.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Apakah hubungan antara sistem informasi manajemen daerah (SIMDA), kualitas sumber daya manusia (SDM), penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP) dan sistem pengendalian internal (SPI) secara simultan mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah kualitas sumber daya manusia (SDM) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
4. Apakah penerapan Standar akuntansi pemerintahan (SAP) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah?
5. Apakah Sistem pengendalian internal (SPI) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis hubungan antara sistem informasi manajemen daerah (SIMDA), kualitas sumber daya manusia (SDM), penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP) dan sistem pengendalian internal (SPI) secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah daerah.
2. Untuk menganalisis pengaruh sistem informasi manajemen daerah (SIMDA) terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah daerah.
3. Untuk menganalisis pengaruh kualitas sumber daya manusia (SDM) terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah daerah?
4. Untuk menganalisis pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP) terhadap kualitas laporan keuangan daerah?
5. Untuk menganalisis pengaruh sistem pengendalian internal (SPI) terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah daerah?

1.3.2. Manfaat Penelitian

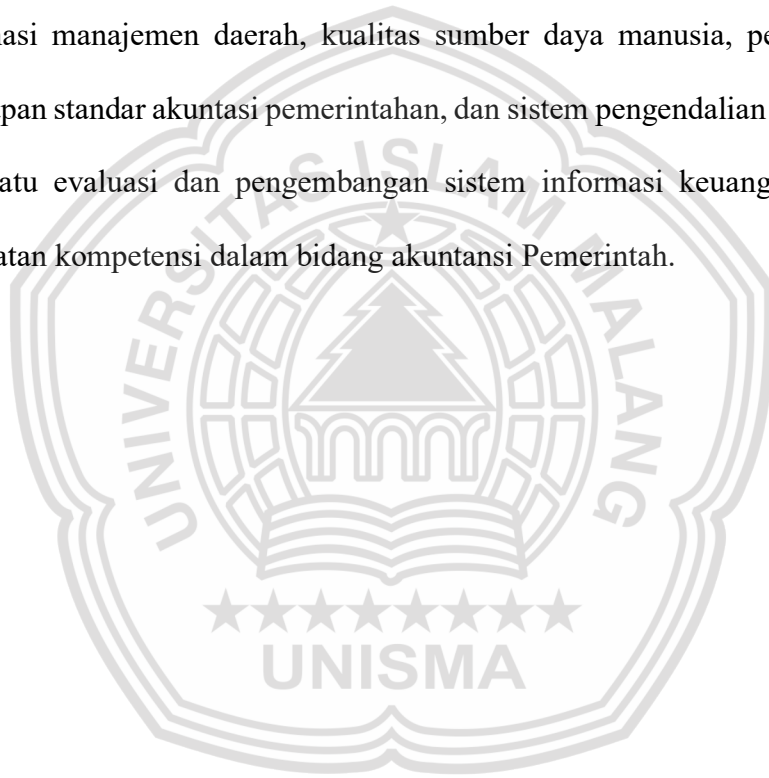
Manfaat Teoritis :

1. Menambah wawasan tentang sistem informasi manajemen daerah, kualitas sumber daya manusia, penerapan penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan sistem pengendalian internal terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Mengembangkan teori akuntansi sektor publik dan perspektif teori keagenan dalam pengelolaan keuangan daerah, yang membahas hubungan antara pemerintah (sebagai prinsipal) dan aparat pemerintah (sebagai agen).

Manfaat Praktis :

1. Memberikan rekomendasi bagi pemerintah Kabupaten Bima dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui perbaikan sistem informasi manajemen daerah, kualitas sumber daya manusia, penerapan penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan sistem pengendalian internal.
2. Membantu evaluasi dan pengembangan sistem informasi keuangan serta penguatan kompetensi dalam bidang akuntansi Pemerintah.



BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh sistem informasi manajemen daerah kualitas sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sistem Informasi Manajemen Daerah, Kualitas SDM, Perapan SAP, dan SPI secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan Keuangan.
2. Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
3. Kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
4. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
5. Sistem Pengendalian Internal berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

5.2. Keterbatasan

1. Penelitian ini hanya berfokus pada organisasi perangkat daerah (OPD) di wilayah Pemerintah Kabupaten Bima, sehingga hasil yang diperoleh belum tentu dapat mewakili secara menyeluruh kondisi daerah lain dengan karakteristik yang berbeda.

2. Responden yang terlibat dalam penelitian ini hanya 7 OPD saja, hal ini membatasi representasi keseluruhan OPD di Kabupaten Bima.
3. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini belum mencakup seluruh aspek secara potensial yang dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan. Hal ini kemungkinan adanya faktor-faktor penting lainnya yang belum dipertimbangkan dalam analisis.

5.3. Saran

1. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk memperluas cakupan wilayah penelitian, misalnya dengan melibatkan OPD dari beberapa kabupaten/kota lain yang memiliki karakteristik berbeda. Hal ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan generalisasi hasil penelitian yang lebih luas.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melibatkan jumlah OPD yang lebih banyak serta mempertimbangkan keragaman jenis OPD yang diteliti. Dengan demikian, hasil penelitian di masa mendatang akan lebih representatif dan mampu menggambarkan kondisi nyata secara menyeluruh di lingkungan pemerintah daerah.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan model penelitian dengan menambah variabel-variabel yang mungkin berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, seperti peran audit internal, budaya organisasi, serta faktor lain yang mungkin berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, M. (2014). Analisis Faktor Pendukung Implementasi SIMDA dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada SKPD (Penelitian pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo). *3rd Economics & Business Research Festival, 13 November*, 1698–1712.
- Ariska, C., Masniadi, R., & Rachman, R. (2019). Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Skpd Di Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Riset Kajian Teknologi Dan Lingkungan*, 2(1), 15–23. <http://www.e-journalppmunsa.ac.id/index.php/jrktl/article/view/58>
- Abidin, M. K., Afifudin, & Junaidi. (2018). Pengaruh Implementasi Sistem Manajemen Daerah (Simda), Kualitas Sumber Daya Manusia Dan Penerapan Standar Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Malang. *E-Jra*, 07(10), 32–45.
- Budiman, F., & Arza, F. I. (2013). Pendekatan Technology Acceptance Model Dalam Kesuksesan Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah. *Wahana Riset Akuntansi*, 1(1), 87-110
- Bahri, S. (2018). Metodologi Penelitian Bisnis Lengkap Dengan Teknik Pengolahan Data SPSS. *Penerbit Andi (Anggota Ikapi). Percetakan Andi Offset. Yogyakarta*.
- Bastian, I. (2010). Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga. *Jakarta: Erlangga*.
- Cahyani, A. D., Mulyani, S., & Budiman, N. A. (2020). Pengaruh Akuntansi Berbasis SAK EMKM, Kualitas Sumber Daya Manusia, dan Karakteristik Usaha Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Seminar Nasional Manajemen, Ekonomi Dan Akuntansi, September*, 12–22. <https://proceeding.unpkediri.ac.id/index.php/senmea/article/view/224/193>
- Damayanti, I. (2020). Analisis Sistem Pengendalian Internal Pada Sistem Akuntansi Pemerintah (Studi Kasus Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Semarang). *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 12(1), 95–102. <https://doi.org/10.22225/kr.12.1.1852.95-102>
- Darmawan, A. (2018). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Defitri, S. Y. (2018). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *jurnal Benefita*, 64–75.
- Defitri, S. Y. (2018). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem

Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *jurnal Benefita*, 64–75.

Faristina Rosalina. 2011. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi keandalan dan Timeliness Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum. Studi pada BLU di Kota Semarang*. Skripsi Universitas Diponegoro: Semarang.

Sarlota Faturey, Nicolas Ahuluheluw, F. H. B. (2021). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal, Kualitas Sdm Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Conference on Economic and Business Innovation*, 1(1), 368–379.

Gustina, I. R. A. (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Penerapan. *Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia.*, 10(1), 56–64.

Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Peneliti Universitas Diponegoro.

Hendri, M., & NR, E. (2020). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2479–2493. <https://doi.org/10.24036/jea.v2i1.224>

Indonesia, P. R. (2008). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of financial economics*, 3(4), 305–360.

Lumintang, N. D. (2015). Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) Keuangan Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Barang Milik Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (Simda) Keuangan Pada. *Jurnal Riset Terapan ...*, 28. file:///D:/matrik/Natalia Lumintang.pdf

L, L., Asnawi, M., & Pangayow, B. J. C. (2019). Pengaruh Implementasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (Simda), Kualitas Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Spip) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi, Audit, Dan Aset*, 2(2), 18–38. https://doi.org/10.52062/jurnal_aaa.v2i2.29

Lestari, R., Yudi, U., & Erwati, M. (2023). *Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan , Kualitas SDM , dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo*. 8(2), 283–302.

- Mardiasmo. (2018). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Martini, R., Satirah, F. R., Nurhasanah, Ibrahim, K. B. C. S., Rachman, K., & Husin, F. (2022). Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palembang: Dari Aspek Sistem Pengendalian Internal. *Jurnal Ekonomi, Bisnis, Akuntansi Dan Sistem Informasi (EKSISTANSI)*, 11(1), 1420–1427. <http://jurnal.polsri.ac.id/index.php/eksistansi/article/view/4595>
- MACHMUD, R. (2013). Peranan penerapan sistem informasi manajemen terhadap efektivitas kerja pegawai lembaga pemasyarakatan narkotika (lapastika) bollangi kabupaten gowa. *Jurnal Capacity STIE AMKOP Makassar*, 9(3), 409–421.
- Nurilah. (2014). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Pemanfaatan Teknologi Informasi, (Studi Empiris Pada SKPD Kota Depok). *JOM FEKON Universitas Diponegoro*.
- Purnama, F., & Nadirsyah. (2016). Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas, dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Aceh Barat Daya. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 1(2), 1–15.
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah
- Pemerintahan, K. S. A. (2005). Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan. *Jakarta: Salemba Empat*.
- Purwanto. (2008). *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Pustaka Pelajar.
- Rahim Br. purba, A. M. A. (2018). penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, transparansi publik dan pengendalian terhadap akuntabilitas keuangan pada badan keuangan daerah kabupaten tanah datar. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis, vol.18, No.2*
- Rosita. (2019). Pengaruh Komitmen Organisasi. Sistem Sumber Daya Manusia. Penerapan Standar Skripsi Oleh: Nama Anindya Mega Rosita Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Setiawan, A. T., & Permadani, R. P. (2016). Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Welasasih. *Jurnal TAM (Technology Acceptance Model)*, 7(Desember), 52–60
- Supriyono, R. A. 2018. Akuntansi Keprilakuan. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Sinta Puspitaningrum, M. M. (2021). pengaruh implementasi sistem informasi manajemen keuangan daerah (simda), kualitas sumber daya manusia, dan

dukungan manajemen puncak terhadap kualitas laporan keuangan. *Pena Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi*, Vol 35, No. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31941/jurnalpena.v35i1.1968>

Sari, D. (2013). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah, Penyelesaian Temuan Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah & Implikasinya Terhadap Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik. *Indonesian Journal Of Economics And Business IJEB*, September 2013, 43.

Sugiyono, P. D. (2014). Populasi dan sampel. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, 291, 292.

Sugiono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. PT Alfabet.

Sugiyono. (2019). *Metode Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Edisi 2). Alfabeta.

Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Metodologi Penelitian Bisnis Dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Santosa, P. I. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif*. CV. ANDI OFFSET.

Tuasikal, A. (2007). Pengaruh Pengawasan, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Dan Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Pemerintah Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Maluku). In *Jurnal Keuangan dan Perbankan* (Vol. 10, Issue 1, pp. 1–27).

Udiyanti, Ni Luh Nyoman, Anantawikrama Tungga Atmadja dan Nyoman Ari Surya Darmawan,. 2014” Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Skpd Kabupaten Buleleng)” e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program S1 (Volume 2 No: 1 Tahun 2014).eprints.ums.ac.id/47414/11/7.pdf.

Wansyah, H., Bakar, U., Banda Aceh, K., & Ekonomi Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, F. (2012). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Kegiatan Pengendalian Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Skpd Pada Provinsi Aceh. *Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 16(1), 43. www.medanbisnisdaily.com

Wirawan, W. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia Indonesia: Teori, Psikologi, Hukum Ketenagakerjaan, Aplikasi dan Penelitian: Aplikasi dalam*

Organisasi Bisnis, Pemerintahan dan Pendidikan. *Jakarta: Raja Grafindo Persada*

Wibowo, W. L., Suharno, S., & Widarno, B. (2020). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informasi*, 16(1), 52–61. <https://doi.org/10.33061/jasti.v16i1.4415>

Yuliani, N. L., & Agustini, R. D. (2016). Factors Affecting the Quality of Local Government Financial Statements. *Jurnal Bisnis & Ekonomi*, 14(1), 56–65.

